

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Peran Pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui tiga fungsi utama: sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator

Sebagai fasilitator, pemerintah kelurahan Suryatmajan memberikan berbagai fasilitas kepada UMKM, seperti pelatihan, bantuan dalam pemasaran produk, serta pendampingan dalam pengajuan izin usaha seperti PIRT dan HKI. Namun, tantangan tetap ada terutama dalam hal pemasaran produk, inovasi, dan akses permodalan.

Sebagai regulator, pemerintah bertanggung jawab untuk membuat kebijakan yang mempermudah usaha UMKM dan menjaga kondisi lingkungan usaha yang kondusif. Meskipun demikian, pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah terutama berfokus pada proses perizinan usaha PIRT dan HKI.

Sebagai katalisator, pemerintah berusaha mempercepat pertumbuhan UMKM menjadi fast-moving enterprise dengan langkah-langkah seperti pemberdayaan komunitas kreatif, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan penyediaan modal termasuk modal ventura. Namun, terdapat ketidaksepakatan atau kekurangan dalam hal permodalan, inovasi, dan pemasaran produk menurut koordinator-UMKM.

Dengan demikian, meskipun pemerintah telah melakukan upaya signifikan dalam mendukung UMKM, masih diperlukan peninjauan dan perbaikan lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua aspek, termasuk permodalan, inovasi, dan pemasaran produk, mendapat dukungan yang cukup untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing UMKM di pasar.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil daei penelitian ini penulis memberikan saran terhadap peningkatan UMKM pada.

1. Meskipun telah ada pelatihan yang tersedia, penting untuk mengembangkan variasi materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang dikenali dari UMKM. Ini meliputi pelatihan dalam manajemen bisnis, pemasaran digital, dan inovasi produk.
2. Pemerintah perlu lebih aktif dalam memberikan dukungan dan fasilitas untuk pemasaran dan inovasi produk. Ini bisa dilakukan melalui penyelenggaraan workshop, seminar, atau konsultasi dengan para ahli di bidang tersebut untuk membantu UMKM mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan inovasi produk yang lebih sesuai dengan permintaan pasar.
3. Pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan untuk menyediakan akses permodalan yang lebih mudah bagi UMKM, termasuk modal ventura atau modal bergulir. Selain itu, program pelatihan tentang manajemen keuangan dan pencarian modal juga dapat diselenggarakan untuk membantu UMKM memahami lebih baik tentang manajemen keuangan dan cara mendapatkan sumber pendanaan yang tepat.
4. Untuk memperkuat perannya sebagai regulator, pemerintah perlu memberikan pendampingan dan bimbingan yang lebih luas kepada UMKM terkait dengan proses perizinan dan persyaratan regulasi lainnya. Ini akan membantu UMKM untuk mematuhi regulasi dengan lebih baik dan mengurangi risiko pelanggaran hukum.